

Globalisasi Ekonomi: Strategi Ekspansi Pasar Ekonomi Tiongkok ke dalam Pasar Domestik Indonesia Melalui Kerangka ACFTA Pada Tahun 2010 - 2016

Lukman Hakim¹
Tulus Yuniasih²

Abstract

This study aims to explain how China's strategy related to its market expansion into Indonesia domestic market through ACFTA. The periodicity of this study commences from 2010 to 2016, a period indicating when ACFTA is formally enacted. This study uses qualitative methods using a number of frameworks on the concept of strategy, expansion, neoliberal institutional and international trade. From the analysis that has been done, ACFTA has become an effective medium to accommodate China's cooperation relations with Indonesia, especially related to the strategy undertaken by China in expanding its market expansion into Indonesian domestic market. This is reflected in the trade surplus that China has always received from Indonesia since the introduction of the ACFTA. China's strategy in expanding the market to Indonesia through ACFTA is to foster harmonious relations and provide market opportunities to Indonesia for the continued integration of cooperation between Indonesia and China in ACFTA, utilizing the tariff policy adjustment contained in ACFTA cooperation scheme and maximizing market advantage owned China.

Keywords: ACFTA, strategy, Indonesia, China

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak diimplementasikannya program reformasi ekonomi pada tahun 1980, Tiongkok berhasil tumbuh menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kehadiran Tiongkok sebagai pemain penting dalam konstelasi perekonomian global merupakan representasi dari performa ekonominya yang dapat bersanding bahkan menyaingi hegemoni ekonomi negara-negara barat. Dengan mengacu kepada prestasi ekonomi Tiongkok, hal ini menjadi sebuah peluang bagi negara-negara di dunia untuk menjadikan Tiongkok sebagai mitra kerja sama ekonomi yang potensial terlebih baik negara-negara yang memiliki kedekatan secara geografis seperti di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) khususnya Indonesia.

¹ Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur.
luckmenisme@gmail.com

² Dosen Tetap Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur.

Hubungan kedua negara telah mengalami dinamika baik dalam sektor ekonomi maupun politik sejak secara resmi menjalin hubungan diplomatik di tahun 1950. Pada awalnya hubungan kedua negara berjalan dengan harmonis dan kooperatif namun, mengalami pembekuan di tahun 1967 akibat peristiwa G-30S PKI di dalam negeri. Hingga pada akhirnya Indonesia dan Tiongkok melakukan normalisasi hubungan pada tahun 1990 melalui penandatanganan nota kesepahaman penerusan hubungan diplomatik "*The Resumption of The Diplomatic Relations between The Two Countries*" di Beijing (Dzafar, 2008: 73). Hal tersebut dilanjutkan dengan pembentukan komisi bersama bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknik yang disepakati kedua negara di tahun yang sama (Sasongko, 2008: 294). Tiongkok mulai memperoleh posisi penting dalam konstalasi politik dalam dan luar negeri Indonesia pasca berakhirnya krisis finansial Asia dan beralihnya rezim orde baru ke era reformasi di tahun 1998. Pada periode ini pula pemerintah Indonesia mulai memusatkan konteks kerjasama bilateral Indonesia – Tiongkok pada dimensi ekonomi yang di antaranya meliputi sektor perdagangan (Sukma, 2009: 142 – 143).

Hubungan kerjasama perdagangan kedua negara semakin memasuki puncaknya pasca Tiongkok menyarankan adanya sebuah bentuk integrasi perdagangan bebas antara ASEAN dengan Tiongkok yakni, ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) pada tahun 2001. Lalu pada tahun 2002, ASEAN dan Tiongkok menanda tangani *Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* pada ASEAN – China Summit ke-6 di Kamboja. Dari penandatanganan inilah Indonesia dan Tiongkok memiliki landasan untuk saling memegang komitmen dalam menjaga dan meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan kedua negara melalui penandatanganan kerangka kerja ACFTA yang bertujuan untuk memudahkan dan memfasilitasi kerjasama ekonomi kedua pihak sebagai tahap penyempurnaan dari pelaksanaan ACFTA yang secara resmi diberlakukan pada tahun 2010 (KEMENDAG, 2012).

Di dalam pelaksanaan skema ACFTA, siklus perdagangan antara ASEAN – Tiongkok mengalami peningkatan sebesar 11,3% di tahun 2010 dari 3,5% pasca krisis Asia di tahun 1998. Hal tersebut sekaligus menjadikan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar ASEAN dengan volume perdagangan sebesar 2,3 Triliun USD (ASEAN, 2011: 14 – 15). Meskipun aktivitas perdagangan kedua pihak semakin intensif dan meningkat setiap tahunnya, pada kenyataannya Tiongkoklah yang lebih dominan menguasai arena pasar ekonomi ASEAN. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil surplus yang diperoleh Tiongkok dari kerjasama ekonominya dengan ASEAN sebesar 60 Miliar USD pada tahun 2010 (ASEAN, 2012). Namun diantara negara – negara ASEAN, hanya Indonesia yang mengalami defisit paling besar dari Tiongkok pasca diberlakukannya ACFTA. Pada tahun 2010, total perdagangan Indonesia – Tiongkok mencapai 36 Miliar USD dengan defisit untuk Indonesia mencapai 4,7 Miliar USD. Sebaliknya, Tiongkok mengalami surplus perdagangan dengan Indonesia sebesar 1,1 Miliar USD dengan total perdagangan sebesar 42 Miliar USD. Jumlah tersebut menjadikan Tiongkok sebagai importir terbesar Indonesia sekaligus menempati urutan ke-19 sebagai negara tujuan ekspor Tiongkok ke dunia (WITS, 2010).

Pada tahun 2012 – 2016 nilai perdagangan kedua negara mencapai 47 Miliar USD namun, neraca perdagangan Indonesia selama periode tersebut mengalami defisit sebesar 14 Miliar USD atau berada di angka -3,01% jika dilihat dari total presentase perdagangan Indonesia dengan Tiongkok (KEMENDAG, 2017). Dari data perdagangan yang telah dipaparkan, tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan harapan Indonesia untuk mengikuti ACFTA, karena defisit yang diterima Indonesia dari kerjasama perdagangannya dengan Tiongkok melalui ACFTA semakin meningkat dari tahun 2010 – 2016. Dengan kata lain, ACFTA hanyalah sebuah bagian dari sebuah strategi Tiongkok untuk memperluas dan

meningkatkan penetrasi pasarnya ke Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji sekaligus menganalisis tentang eksistensi ACFTA sebagai media yang mampu menunjang keberhasilan penetrasi pasar Tiongkok ke Indonesia melalui sebuah rumusan pertanyaan yaitu, "bagaimana strategi yang dilakukan Tiongkok terkait ekspansi pasarnya ke dalam sektor pasar domestik Indonesia melalui kerangka ACFTA pada tahun 2010 – 2016?"

Untuk membantu penulis dalam menganalisis pertanyaan penelitian, digunakanlah beberapa kerangka pemikiran mengenai konsep strategi, neoliberal institusional dan perdagangan internasional. Konsep strategi menjelaskan tentang langkah yang ditempuh suatu negara untuk mendapatkan keuntungan dari keterlibatannya dalam sebuah integrasi. Kemudian, konsep neoliberal institusional untuk menjelaskan eksistensi ACFTA sebagai bentuk integrasi yang mengakomodir hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok. Konsep perdagangan internasional menjelaskan bagaimana keuntungan pasar lebih banyak diperoleh Tiongkok daripada Indonesia dalam konteks kerjasama perdagangan yang berlangsung di bawah payung ACFTA.

Pembahasan

Dibutuhkan waktu hampir dua dekade bagi Tiongkok untuk dapat menjalin kembali intensitas hubungan kerjasama khususnya dalam sektor perdagangan dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya sikap antipatif Indonesia pasca normalisasi dan hanya ingin mengembangkan dimensi kerjasama ekonominya secara terbatas dengan Tiongkok hanya melalui jalur multilateral yakni, ASEAN (Sukma, 2009: 152 – 153). Meskipun demikian Tiongkok melihat ASEAN sebagai instrumen yang dapat secara efektif mengakomodir hubungan bilateralnya dengan Indonesia terutama dalam meningkatkan intensitas kerjasama di sektor perdagangan kedua pihak. Hingga pada akhirnya, seiring dengan meningkatnya posisi Tiongkok dalam konstelasi politik luar negeri Indonesia pasca reformasi (Sukma, 2009: 142 – 143), pada tahun 2001 Tiongkok mengusulkan pembentukan wilayah perdagangan bebas dengan ASEAN yakni, *ASEAN – Cina Free Trade Area* (ACFTA) (Sinaga, 2013: 20 – 21).

Skema pembentukan ACFTA kemudian berlanjut dengan ditandatanganinya *Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* pada ASEAN – China Summit ke-6 di Kamboja pada tahun 2002 dan inilah yang menjadi kerangka utama dari setiap pembentukan *framework agreement* ACFTA hingga secara resmi diimplementasikan pada tahun 2010 (KEMENDAG, 2012). Terimplementasinya ACFTA, telah berhasil menjadi sarana yang mampu meningkatkan siklus kerjasama perdagangan kedua negara dengan total nilai perdagangan Indonesia dari Tiongkok sebesar 36 Miliar USD di tahun 2010 menjadi 47 Miliar USD di tahun 2016 (KEMENDAG, 2017).

Tabel 1. Neraca Perdagangan Indonesia–Tiongkok Tahun 2010–2016
(dalam Juta USD)

Deskripsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Trend (%)
Total Perdagangan	3.6116,8	4.9153,1	5.1045,2	5.2450,9	48.230,2	44.457,3	47.591,2	3,01
Minyak & Gas	2.3478	2.101,1	1.219,2	1.598,9	1.309,6	1.971,8	1.783,7	10,19
Non Minyak & Gas	3.3768,9	47.052	49.826	50.852	46.920,6	42.485,4	45.807,5	-3,42
Ekspor	15.692,6	22.941	21.659,5	22.601,4	17.605,9	15.046,4	16.790,8	-8,75
Minyak & Gas	1.611,6	1.345,4	795,4	1.319,9	1.146,8	1.785,7	1.672,7	19,59
Non Minyak & Gas	14.080,9	21.595,5	20.864	21.281,5	16.459	13.260,6	15.118	-10,57
Impor	20.424,2	26.212,1	29.385,7	29.849,4	30.624,3	29.410,8	30.800,4	0,80
Minyak & Gas	736,2	755,7	423,8	279	162,7	186	110,9	-26,55
Non Minyak & Gas	19.688	25.456,4	28.961,9	29.570,4	30.461,5	29.224,8	30.689,5	1,05
Neraca Perdagangan	-4.731,6	-3.271,1	-7.726,2	-7.247,9	-13.018,3	-14.364,4	-14.009,6	20,61
Minyak & Gas	875,4	589,6	371,5	1.040,8	984	1.599,6	1.561,7	39,12
Non Minyak & Gas	-5.607	-3.860,8	-8.097,8	-8.288,8	-14.002,4	-15.964,1	-15.571,4	21,69

Sumber: Kementerian Perdagangan

Meskipun total perdagangan Indonesia dengan Tiongkok terus mengalami peningkatan sejak ACFTA diberlakukan pada tahun 2010, hal ini bertolak belakang dengan angka neraca perdagangan Indonesia yang secara berkelanjutan mengalami defisit perdagangan dari Tiongkok hingga akhir tahun 2016. Pada tahun 2010, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar 4,7 miliar USD dan trend defisit meningkat 10 miliar USD yang menjadi 14 miliar USD di tahun 2016. Hal ini tentunya diluar dari harapan Indonesia yang menginginkan keuntungan dari kerjasama perdagangannya dengan Tiongkok melalui skema kerjasama ACFTA. Tentu saja hal ini perlu dikaji lebih lanjut tentang bagaimana eksistensi ACFTA yang mampu menjadi strategi yang dapat menstimulus Tiongkok mendapatkan hasil surplus dari hasil kerjasama perdagangannya dengan Indonesia sedangkan pada prinsipnya, segala ketentuan dan regulasi yang terdapat dalam ACFTA bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara bersama. Sebagaimana diketahui, Tiongkok memandang penting posisi Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang besar di kawasan Asia Tenggara dan memainkan peran kunci untuk stabilitas regional. Alhasil, tidak heran jika Tiongkok rela menunggu lama untuk dapat membuka kembali dan mengembangkan hubungan kerjasamanya dengan Indonesia khususnya dalam sektor perdagangan. Melihat akan peluang dan potensi yang dimiliki Indonesia, ACFTA merupakan sebuah representatif dari strategi yang digunakan Tiongkok untuk dapat memperluas ekspansi pasarnya ke dalam pasar domestik Indonesia sekaligus menjadi media yang mampu mengeratkan hubungan bilateral kedua negara.

Membina hubungan yang harmonis dan memberikan peluang pasar kepada Indonesia demi kelanjutan integrasi kerjasama antara Indonesia – Tiongkok dalam ACFTA

Dapat dikatakan bahwa ACFTA merupakan media yang merefleksikan kondusifitas hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok. Sebagaimana diketahui, tanpa adanya hubungan yang harmonis dan kondusif, Tiongkok tidak akan dapat menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan Indonesia bahkan memperluas dan meningkatkan ekspansi pasarnya ke dalam pasar domestik Indonesia. ACFTA telah berhasil menjadi strategi bagi Tiongkok dalam menjembatani hubungan kerjasama perdagangannya dengan Indonesia. Berpedoman kepada pendapat yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg bahwasanya, integritas merupakan bentuk dari hasil sebuah strategi yang di dalamnya terdapat tujuan dari keterlibatan aktor, perilaku aktor yang dapat mempengaruhi tujuannya di dalam integritas dan informasi yang dapat memberikan keuntungan aktor tersebut dalam sebuah integritas (Mintzberg, 2007: 3 – 9). VN Bhattacharya menambahkan, pemaparan konsep strategi lebih menekankan kepada siapa strategi itu ditujukan, bagaimana strategi itu dijalankan dan langkah-langkah apa yang digunakan aktor untuk dapat meraih keuntungan dalam jangka panjang dari strategi yang telah dijalankan (Bhattacharya, 2007: 1 – 2). Dapat disimpulkan bahwa pendapat mengenai konsep strategi yang disimpulkan oleh Mintzberg dan Bhattacharya lebih menekankan adanya seperangkat aturan yang mengatur dan mengikat pola interaksi antar aktor melalui sebuah integritas sehingga, setiap aktor dapat memaksimalkan potensinya masing-masing melalui kerjasama yang bersifat saling menguntungkan. Di satu sisi, keberadaan integritas menjadi media penunjang untuk menggapai kepentingan masing-masing aktor di dalamnya sehingga selain bersifat konstruktif tetapi juga kompetitif. Hal ini terkait dengan strategi dan taktik yang digunakan setiap aktor untuk mencapai tujuannya dalam jangka panjang.

Bagi Tiongkok, ACFTA memiliki peran besar terhadap perkembangan dan kelangsungan hubungan kerjasamanya dengan Indonesia. Dengan kata lain, hal ini menjadi sebuah prestasi bagi Tiongkok karena butuh pendekatan politik yang cukup lama untuk dapat menjalin kembali hubungan yang konstruktif dengan Indonesia bahkan pasca normalisasi dilakukan kedua negara. Hal tersebut dilandasi oleh motivasi Tiongkok yang melihat Indonesia sebagai negara dengan potensi dan peluang pasar yang besar. berpedoman kepada konsep strategi yang dikemukakan oleh Mintzberg dan Bhattacharya, bahwasanya, ACFTA telah menjadi instrumen yang efektif digunakan Tiongkok dalam menjaga keharmonisan hubungannya dengan Tiongkok demi kelangsungan aktivitas ekspansi pasarnya ke Indonesia dalam jangka panjang. Hal ini ditunjukkan dari adanya kesepakatan – kesepakatan bilateral yang membahas tentang peningkatan hubungan kerjasama ekonomi yang salah satunya ialah tentang kemitraan dagang antar kedua negara pasca secara resmi ACFTA diimplementasikan. Dengan terdapatnya peningkatan aktivitas hubungan bilateral Indonesia – Tiongkok terutama yang berkenaan dengan kerjasama perdagangan antar kedua negara pasca ACFTA diberlakukan maka, dapat dikatakan bahwa ACFTA merupakan gerbang pembuka dari skema kerjasama perdagangan kedua negara yang bersifat berkelanjutan atau jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari total perdagangan Indonesia - Tiongkok pada tahun 2016 yang semakin meningkat terhitung sejak ACFTA secara resmi diberlakukan pada tahun 2010.

Potensi dan peluang pasar yang dimiliki Indonesia jika hanya berjalan di bawah payung perdagangan bebas di lingkup ASEAN, tidak akan mengalami peningkatan secara

maksimal. Hal ini dikarenakan komoditas produk yang diperdagangkan antar negara intra ASEAN memiliki kemiripan satu sama lain dan belum terdapat diversifikasi industri sehingga belum dapat menarik manfaat dari komplementaritas pasar regional dan sulit untuk mengembangkan perdagangan yang saling menguntungkan (Inayati, 2013: 38). Sebaliknya, dengan adanya ACFTA atmosfer hubungan kerjasama perdagangan Indonesia – Tiongkok nampak bersifat simbiosis mutualisme dan saling menguntungkan. Seperti pendapat yang dikemukakan Mintzberg dan Bhattacharya, integritas merupakan pilar dari sebuah strategi yang bertujuan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki antar aktor secara maksimal melalui metode kerjasama. Meskipun trend surplus perdagangan yang berlangsung sejak tahun 2010 – 2016 selalu diperoleh Tiongkok dari Indonesia, Tiongkok telah dapat menggali potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia dan hal ini membuka pandangan dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai kelebihan khususnya dalam hal sumber daya, luas wilayah dan potensi pasar (Elisabeth, 2013: 66).

Perlu diketahui, Tiongkok merupakan negara yang dapat dikatakan hampir selalu berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang melibatkan kawasan seperti ASEAN+3 di tahun 1997 hingga ACFTA yang secara resmi diimplementasikan pada tahun 2010. Bagaimanapun, terkait dengan sikap Tiongkok terhadap Indonesia dalam bagan kerjasama ACFTA merupakan sebuah representasi dari langkah yang digunakan Tiongkok untuk menjaga keharmonisan hubungan kerjasamanya dengan Indonesia di sektor perdagangan. Melalui pendekatan-pendekatan integrasi kawasan, Tiongkok berupaya untuk memupuk citra baik kepada Indonesia sebagai bagian dari kelanjutan hubungan kerjasama bilateral kedua negara dan mencegah munculnya persepsi ancaman dari Indonesia terhadap Tiongkok. Walaupun di satu sisi Indonesia menyadari, bahwa akan ada banyak tantangan yang muncul khususnya dari kawasan apabila Indonesia tidak mengikuti skema ACFTA.

Bagi Indonesia melibatkan Tiongkok dalam konstelasi perdagangan di kawasan ASEAN tampak menjadi sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan terjalinnya hubungan kerjasama kedua negara di latar belakang oleh adanya sifat interdependensi sehingga, baik Indonesia ataupun Tiongkok akan merasa diuntungkan dari adanya integrasi ACFTA. Seperti diketahui, Tiongkok merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia berkat pesatnya aktifitas industri di dalam negeri. Tiongkok akan selalu membutuhkan pasokan bahan baku dan sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan produksinya dalam skala yang besar. Hal ini menjadi nilai tambah bagi Indonesia yang lebih unggul dalam sektor sumber daya sama seperti halnya dengan keunggulan negara – negara ASEAN lainnya yang terlibat dalam skema ACFTA. Motif lain dari keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA didorong oleh adanya faktor internal ASEAN yang para anggotanya menyepakati agenda kerjasama ini. Apabila Indonesia tidak mengikuti skema ACFTA, Indonesia akan mengalami kekalahan dalam kompetisi perdagangan di dalam intraregional ASEAN bahkan pasar domestik akan terancam oleh pasar negara ASEAN lainnya yang mendapatkan keuntungan dari hubungan kerjasamanya dengan Tiongkok. Ditambah akses Indonesia ke pasar Tiongkok akan mengalami keterbatasan dan akan kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya yang telah terikat oleh perjanjian ACFTA. Untuk menghindari hal ini terjadi, pada akhirnya Indonesia turut terlibat dalam integrasi kerjasama ACFTA.

Tiongkok selalu berada di peringkat atas sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Dalam artian, dari tingkat perdagangan Indonesia dengan dunia, Tiongkok lah negara yang paling intensif menjalin dan meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan dengan Indonesia. Prestasi ini merupakan bentuk dari sifat antusias Tiongkok yang menginginkan

adanya penjalinan hubungan kerjasama perdagangan dengan Indonesia secara terintegrasi. Tiongkok akan selalu membutuhkan instrumen yang dapat menjembatani hubungan dengan regional Asia Tenggara, mengingat kawasan ini memiliki nilai yang sangat strategis untuk mendukung performa pasarnya. Begitupun sebaliknya, dengan keterikatan kedua pihak dalam skema ACFTA, ASEAN berharap ACFTA dapat menjadi sebuah integrasi yang dapat mengikat Tiongkok untuk turut berkepentingan dalam mendukung stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia (Inayati, 2006: 14 – 15). Dengan demikian, baik ASEAN ataupun Tiongkok akan selalu memegang komitmen dan menghormati aturan yang terdapat dalam ACFTA. Meskipun di satu sisi, peluang yang di dapatkan Indonesia tidak sebanding dengan tantangan yang diterima dari kerjasama perdagangannya dengan Tiongkok melalui kerangka ACFTA.

Penyesuaian kebijakan tarif dalam skema ACFTA dan keunggulan pasar yang dimiliki Tiongkok

Sejak diimplementasikan pada tahun 2010, ASEAN dan Tiongkok saling bersepakat untuk membentuk ketentuan – ketentuan yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan ACFTA. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengurangan dan penghapusan tarif terhadap produk – produk secara bertahap yang terdiri dari tiga tahap *Early Harvest Program (EHP)*, *Normal Track* dan *Sensitive List* (Setiawan, 2012: 132 – 133).

1. *Early Harvest Program (EHP)*, berupa kesepakatan dua pihak bahwa tarif bea masuk dihapuskan secara berkala menjadi 0% dari tahun 2004 – 2006. Indonesia telah menindaklanjuti ketentuan ini melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK/.01/2004 pada tanggal 21 Juli 2004 tentang penetapan bea masuk atas impor barang dalam rangka *Early Harvest Package* ASEAN-China Free Trade Area yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan
2. *Normal Track*, Program penurunan tarif bea masuk yang secara efektif berlaku sebesar 0% dari tahun 2005 – 2010. Peraturan ini telah diimplementasikan Indonesia sesuai dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2005 pada tanggal 7 Juli 2005 tentang penurunan dan penghapusan tarif bea masuk dalam rangka normal track ACFTA yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan perpanjangan tarif bea masuk dalam rangka ACFTA melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.011/2007 pada tanggal 25 Januari 2007. Kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan normal track II berupa penghapus tarif bea masuk dengan pengecualian tarif pos yang dapat diturunkan menjadi 0% pada tahun 2012. Selain itu, sejak tahun 2010, sesuai dengan ketentuan ACFTA setiap negara memberlakukan program tanpa pembatasan kuantitatif terhadap komoditas barang yang turut di didukung dengan penurunan hingga penghilangan tarif bea masuk sebesar 0%.
3. *Sensitive List dan Highly Sensitive*, Penurunan tarif bea masuk terhadap sejumlah komoditas barang yang dikategorikan *sensitive* yang mulai berlaku dari tahun 2012 dengan ketentuan bahwa pembatasan maksimum bea masuk pada tahun 2012 adalah 20% dan akan menjadi 0-5% di tahun 2018. Lalu, produk – produk yang dikategorikan dalam *high sensitive list* akan dilakukan penurunan tarif bea masuk dari 0-5% di tahun 2015

Tidak seperti Tiongkok yang telah mempersiapkan integrasi perdagangan ini dengan matang, Indonesia bahkan perlu menetapkan dan menyesuaikan sejumlah kebijakan yang diantaranya berupa penundaan beberapa sektor yang diperkirakan akan mengganggu industri

nasional yang dinilai masih memerlukan persiapan dalam menghadapi ACFTA. Terdapat sebanyak 228 pos tarif yang diusulkan akan ditunda penerapannya (Setiawan, 2012: 132 – 133), meliputi:

1. Sebanyak 146 pos tarif *Normal Track 1* (NT 1) yang harus 0% pada tahun 2010 diusulkan menjadi *Normal Track 2* (NT 2) atau menjadi 0% pada tahun 2012.
2. Sebanyak 60 pos tarif *Normal Track 1* (NT 1) yang harus 0% pada tahun 2010 diusulkan menjadi *Sensitive List* (SL) atau 0%-5% pada tahun 2018.
3. Sebanyak 22 pos tarif yang sudah 0% dalam ketentuan ACFTA di tahun 2009 dinaikkan menjadi 5% dan dimasukkan dalam kategori *Sensitive List* (SL) atau 0%-5% pada tahun 2018.

Bagi Tiongkok, ACFTA merupakan instrumen yang efektif mengakomodir hubungan kerjasama perdagangannya dengan Indonesia. Pada dasarnya keterlibatan Indonesia dengan Tiongkok dalam sebuah integrasi merupakan sebuah bentuk interdependensi antar kedua negara. Eksistensi Tiongkok dalam pasar global menjadi daya tarik bagi ASEAN khususnya untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara *partner* yang potensial dan mampu menjadi solusi dalam mengatasi segala problema perdagangan yang terjadi di lingkup intra ASEAN. Di satu sisi Tiongkok memandang ASEAN sebagai sebuah integrasi kawasan yang sangat memenuhi kriteria kebutuhan pasar Tiongkok. Tidak hanya sebagai wilayah yang berkontribusi memasok bahan baku untuk menunjang aktivitas industrialisasi di Tiongkok, dengan tingkat populasi yang tinggi tentunya ASEAN akan memberikan Tiongkok akses perluasan pangsa pasar yang potensial seperti halnya Indonesia.

Eksistensi ACFTA sebagai media yang mengakomodir hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dengan Tiongkok nampaknya lebih dapat dimanfaatkan oleh Tiongkok bahkan menjadikan integrasi ini sebagai strategi yang digunakannya untuk terus memperluas dan meningkatkan penetrasi pasarnya ke dalam pasar domestik Indonesia. Sebagaimana apa yang diasumsikan V.N Bhattacharya, bahwa strategi merupakan segala pengambilan tindakan yang bertujuan untuk memenangkan kompetisi. Terdapatnya ketentuan tarif dan perangkat aturan yang memudahkan transaksi perdagangan antar aktor di dalam skema ACFTA, merupakan bagian dari strategi Tiongkok untuk mendukung keberhasilan ekspansi pasarnya ke dalam lini pasar domestik Indonesia. Karena sebagaimana berpedoman kepada pendapat para ahli mengenai strategi, bahwasanya ranah integrasi tidak hanya bersifat kooperatif namun juga kompetitif. Sikap kooperatif Indonesia dengan Tiongkok ditunjukkan dari adanya sikap saling membutuhkan terutama dalam mencapai kepentingan yang berkenaan dengan pasar. Akan tetapi di saat yang sama, kebijakan ketentuan tarif dalam mekanisme ACFTA yang hingga 0% telah memudahkan Tiongkok untuk meningkatkan penetrasi pasarnya ke Indonesia dan tentunya menjadi suatu ancaman serius bagi para pelaku pasar dalam negeri karena khawatir akan kalah bersaing dengan komoditas produk asal Tiongkok. Meskipun pada kenyataannya Tiongkok lebih unggul dalam memaksimalkan ketentuannya di dalam ACFTA, hal yang akan terus dilakukan Tiongkok ialah membina hubungan yang harmonis dengan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa ACFTA merupakan media yang merefleksikan kondusifitas hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok.

Untuk menganalisis efektifitas ACFTA sebagai instrumen yang dapat mendukung keberhasilan ekspansi pasar Tiongkok ke dalam negeri Indonesia, penulis merujuk konsep mengenai neoliberal institusional yang dikemukakan oleh Robert O. Keohane dan Joseph Nye (Keohane, 2004). Menurutnya, bahwa unsur yang menentukan unggulnya suatu negara

dalam sebuah integrasi yang mengakomodir kerjasama antar aktor yaitu kepemilikan *power* yang terdapat pada negara tersebut. Prestasi ekonomi Tiongkok di pasar global telah menimbulkan persepsi dari negara – negara ASEAN bahwa Tiongkok merupakan *partner* yang dapat diandalkan untuk membangkitkan ekonomi intra ASEAN khususnya Indonesia. Namun, di satu sisi *power* yang dimiliki pasar Tiongkok tidak hanya memberikan Indonesia sebuah peluang tetapi juga ancaman.



Gambar 1. Neraca Perdagangan Indonesia – Tiongkok Tahun 2010 – 2015
 Sumber: Kementerian Perdagangan



Gambar 2. Neraca Perdagangan Indonesia – Tiongkok Tahun 2012 – 2016
 Sumber: Kementerian Perdagangan

Dari hasil data di atas menunjukkan bagaimana *power* yang dimiliki Tiongkok dapat secara efektif dan maksimal mengungguli aktifitas perdagangannya dengan Indonesia. Perlu diketahui, latar belakang keinginan Indonesia untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Tiongkok dikarenakan pola pandangannya terhadap Tiongkok sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Motivasi Indonesia turut didorong oleh faktor intra regional ASEAN. Apabila Indonesia tidak mengikuti skema ACFTA, Indonesia akan mengalami kekalahan dalam kompetisi perdagangan di dalam intraregional ASEAN bahkan pasar domestik akan terancam oleh pasar negara ASEAN lainnya yang mendapatkan keuntungan dari hubungan kerjasamanya dengan Tiongkok. Ditambah akses Indonesia ke pasar Tiongkok akan mengalami keterbatasan dan akan kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya yang telah terikat oleh perjanjian ACFTA. Untuk menghindari hal ini terjadi, pada akhirnya Indonesia turut terlibat dalam integrasi kerjasama ACFTA.

Faktor yang turut menjadi strategi pendukung dari keberhasilan ekspansi pasar Tiongkok dari kerjasamanya dengan Tiongkok ialah keunggulan komparatif yang dimiliki pasar Tiongkok sebagaimana konsep perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld (Krugman dan Obstfeld, 2009: 4 – 6). Sejak pemberlakuan ACFTA, produk Indonesia kalah bersaing dengan produk impor asal Tiongkok, sementara struktur industri yang dimiliki Indonesia dengan Tiongkok hampir sama sehingga, menghasilkan produk yang sama dengan produk yang dihasilkan oleh industri di Tiongkok (Inayati, 2013: 43 – 46). Hal ini dikarenakan, murahnya harga produk dari Tiongkok ditambah dengan nilainya yang kompetitif membuat hasil produksi asal negeri tirai bambu lebih diminati konsumen dunia termasuk masyarakat Indonesia.

Industri dalam negeri yang rentan terhadap pemberlakuan ACFTA tidak melakukan persiapan yang seharusnya dilakukan untuk dapat bersaing. Ditambah juga dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang belum secara optimal memberikan dukungan kepada sektor industri dalam negeri untuk dapat bersaing dalam arena perdagangan ACFTA. Hal ini bertolak belakang dengan persiapan yang dilakukan pemerintah Tiongkok melalui program reformasi ekonomi untuk menyambut persaingan ekonomi global termasuk ACFTA. Alhasil, kondisi ini membuat Tiongkok lebih unggul daripada Indonesia dalam menyambut ACFTA meskipun, regulasi yang terdapat dalam ACFTA bertujuan untuk memudahkan transaksi perdagangan antar kedua pihak. Pasca secara resmi ACFTA terlaksana, nyatanya meskipun telah terjadi perubahan dalam beberapa aspek yang cukup berarti sebagai hasil dari proses pembangunan ekonomi, kontribusi sektor-sektor non primer khususnya industri manufaktur, masih relatif kecil dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya (Bustami, 2010). Hal ini merupakan sebuah bentuk kekurangan Indonesia dalam menyambut dan menyigapi ACFTA dimana kurangnya persiapan pemerintah dan pelaku pasar menjadi faktor kunci mengapa Tiongkok lebih unggul daripada Indonesia. Bahkan defisit perdagangan yang dialami Indonesia merupakan yang terbesar dialami oleh negara – negara intra ASEAN dari perdagangannya dengan Tiongkok.

Kesimpulan

Sejak ACFTA diberlakukan secara resmi pada tahun 2010, hanya Indonesia yang memiliki defisit tertinggi dari negara – negara pendiri ASEAN atau yang dikenal dengan ASEAN-5. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan harapan Indonesia yang mengharapkan kebijakan – kebijakan yang terdapat dalam ACFTA mampu memberikan keuntungan bagi Indonesia. Pada dasarnya memang ACFTA merupakan sebuah integrasi intra regional yang mampu

mempermudah dan meningkatkan intensitas hubungan kerjasama ekonomi khususnya perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok. Hal ini dapat dilihat dari total perdagangan Indonesia dengan Tiongkok yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga 2016. Namun, jika dilihat dari neraca perdagangan kedua negara, selama periode tersebut Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan dari Tiongkok.

ACFTA merupakan bagian dari strategi yang digunakan untuk Tiongkok untuk melakukan penetrasi pasarnya ke dalam sektor pasar domestik Indonesia. Hal ini terbukti dari eksistensi ASEAN sebagai media yang mampu mengakomodir hubungan kerjasama Tiongkok dengan Indonesia. Melalui skema ACFTA Tiongkok akan terus membina hubungan yang kondusif melihat dari segi kepentingan Tiongkok terkait potensi dan peluang yang dimiliki pasar Indonesia. Tiongkok akan terus memandang ACFTA sebagai instrumen yang tepat dalam mengakomodir hubungan kerjasama perdagangannya dengan Indonesia. Hal ini terlihat dari bagaimana ketentuan tarif dan kebijakan yang terdapat dalam ACFTA mampu mendukung keunggulan pasar yang dimiliki oleh Tiongkok. Selain itu, skema ACFTA telah terbukti mampu memudahkan Tiongkok untuk memperoleh sumber daya untuk mendukung kelangsungan industri di dalam negeri sekaligus menstimulus ekspansi pasar Tiongkok dalam menembus pasar domestik Indonesia bahkan menyebabkan kekhawatiran akan adanya dominasi dari pasar Tiongkok di dalam negeri dan menjadi sebuah ancaman bagi produksi pasar domestik.

Referensi

- ASEAN Community In Figures.(2011). *ASEAN with Selected Trade Partners & ASEAN with Selected Trade Partners: Total Trade (in percent share) for periods indicated*.<http://www.asean.org/storage/images/archive/publications/ASEAN%20community%20in%20figures.pdf>. Diakses pada 30 Maret 2017.
- ASEAN Statistical Yearbook, *ASEAN Balance of Trade by Trading Partner, 2004 – 2011*.http://www.asean.org/storage/images/2013/resources/statistics/statistical_publication/ASEANStatisticalYearbook2012.pdf. Diakses pada 30 Maret 2017.
- Bhattacharya, VN. 2007. "What Strategy Is Not", dalam *European Business Forum*. No. 30.
- Bustami, Gusmardi. (2010, 27 April). "Indonesia Ditengah Pusaran Arus Perdagangan Bebas". Disampaikan pada Roundtable Discussion P2P- LIPI, Jakarta. Dalam, Lidya Christin Sinaga (eds). Hubungan Indonesia – Cina Dalam Dinamika Politik Pertahanan – Keamanan, Dan Ekonomi di Asia Tenggara: Interdependensi Menuju Regionalisme. Jakarta: LIPI Press.
- Dzafar, Zainuddin, "Hubungan Perdagangan Indonesia – Cina: Diperlukan Redesigning Yang Baru" dalam I.Wibowo dan Syamsul Hadi (ed.). 2009. *Merangkul Cina Hubungan Indonesia-Cina Pasca-Soeharto*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Elisabeth, Adriana. 2013. *Dinamika Hubungan Ekonomi Indonesia-Cina: Pasca- Krisis Asia 1997*. Dalam, Lidya Christin Sinaga (eds). Hubungan Indonesia – Cina Dalam Dinamika Politik Pertahanan – Keamanan, Dan Ekonomi di Asia Tenggara: Interdependensi Menuju Regionalisme. Jakarta: LIPI Press.
- Inayanti, Ratna Shofi. 2006. *ASEAN – CHINA FTA: Akselerasi Menuju East Asia*. Jakarta: LIPI Press.
- Inayanti, Ratna Shofi. 2013. *Dinamika Hubungan Ekonomi ASEAN – Cina: ASEAN Menyambut Kerja Sama Dengan Cina*. Dalam, Lidya Christin Sinaga (eds). Hubungan Indonesia – Cina Dalam Dinamika Politik Pertahanan – Keamanan, Dan Ekonomi di Asia Tenggara: Interdependensi Menuju Regionalisme. Jakarta: LIPI Press.

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2012. *ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA*.
<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/21/asean-china-fta-id0-1356076310.pdf>. Diakses pada tanggal 05 Juli 2017.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Neraca Perdagangan Indonesia-China Tahun 2007-2011 (ribuan USD)*. Dalam, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Edukasi Keuangan, edisi 11*. 2012.
<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/edukasi%20keuangan/Edukasi%20Keuangan%20XI-2012/HTML/files/assets/basic-html/page9.html>. Diakses pada tanggal 05 April 2017.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2017. *Neraca Perdagangan Indonesia dengan Rep. Rakyat Tiongkok periode: 2012 – 2017*. <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=116>. Diakses pada tanggal 5 April 2017.
- Keohane, Robert O. 2004. "Teori dan Institusi Internasional". Pada sesi Interview dengan Harry Kriesler: *Perbincangan Mengenai Sejarah (Institute of International Studies, University of California, Berkeley)*. <http://www.globetrotter.berkeley.edu>. Dikutip pada tanggal 16 Mei 2014.
- Krugman, Paul R. dan Obstfeld, Maurice. 2009. *International Economics Theory and Policy*. Edisi ke-8. Boston: Pearson Addison Wesley.
- Mintzberg, Henry. 2007. *Tracking Strategies: Toward a General Theory*. First Published, Oxford University. New York: Press Inc.
- Setiawan, Sigit. 2012. *ASEAN - CHINA FTA: DAMPAKNYA TERHADAP EKSPOR INDONESIA DAN CHINA*. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan-RI.
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_01.%20ASEAN-CHINA%20FTA%20Dampak%20Ekspor.pdf. Diakses pada tanggal 12 Juli 2017.
- Sinaga, Lidya Christin. 2013. *Hubungan Indonesia – Cina Dalam Dinamika Politik Pertahanan – Keamanan, Dan Ekonomi di Asia Tenggara: Interdependensi Menuju Regionalisme*. Jakarta: LIPI Press.
- Sukma, Rizal. "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties", dalam Jun Tsunekawa (ed.). 2009. *The Rise of China: Response from Southeast Asia and Japan*. The National Institute for Defense Studies, Japan. Hlm. 142 - 143.
- World Integrated Trade Solution. *Indonesia Import & Export in Thousand US\$ for China between 2006 and 2010*.
<http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2010/TradeFlow/EXPI> MP. Diakses pada tanggal 5 April 2017.